



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 36 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dalam Satu Program, Antar Kegiatan Dalam Beberapa Program, dan Antar Jenis Belanja.
- b. bahwa dengan perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dalam Satu Program, Antar Kegiatan Dalam Beberapa Program, dan Antar Jenis Belanja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.






|                |                    |     |       |      |
|----------------|--------------------|-----|-------|------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASDAK<br>KANTOR | ASB | SEKDA | WABU |
|                |                    |     |       |      |

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINAS<br>KANTOR   | ASST  | SEKDA   | WAE   |
|  |  |  |  |  |






Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINA MB/DANI<br>KUNTOR  | ASB   | SEKTA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |


Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DIREKTOR  | ASB   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/BADAN<br>KONTOR   | ASS   | SEKTA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93 );

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

2. Telaahan Staf Plt, Kepala BKAD Kabupaten Boalemo Nomor : 900/BKAD/23a/VI/2021 Perihal Perubahan Perkada tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

|                |                 |     |       |       |
|----------------|-----------------|-----|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS<br>KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP |
| 1              | 2               | 3   | 4     | 5     |

## **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93) diubah sebagai berikut :






1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp. 558.372.068.077,- bertambah/ (berkurang) Rp.987.013.465,- sehingga menjadi Rp.559.359.081.542, yang terdiri atas :
    - a. Belanja pegawai;
    - b. Belanja barang dan jasa;
    - c. Belanja Hibah; dan
    - d. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.327.500.544.427,- bertambah/(berkurang) Rp.(12.869.629.916,10,-) sehingga menjadi Rp. 314.630.914.510,90.-
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 223.035.993.674,- bertambah/ (berkurang) Rp. 14.986.196.891,10.- sehingga menjadi Rp. 237.932.190.565,10.-
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) semula sebesar Rp. 327.500.544.427,- bertambah/(berkurang) Rp. (12.869.629.916,10,-) sehingga menjadi Rp. 314.630.914.510,90.- yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/DOK<br>KANTOR   | ASS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 222.523.194.386,- bertambah/(berkurang) Rp. (12.419.400.118,-) sehingga menjadi Rp. 210.103.794.268,-
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c sebesar Rp 40.201.697.206,- bertambah/(berkurang) Rp. (259.550.000,-) sehingga menjadi Rp. 39.942.147.206,-
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) semula sebesar Rp 223.035.993.674,- bertambah/(berkurang) Rp. 14.896.196.891,10,- sehingga menjadi Rp. 237.932.190.565,10,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 67.849.154.069,33,- bertambah/(berkurang) Rp. 3.667.177.649,62,- sehingga menjadi Rp. 71.516.331.718,95,-
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 79.037.967.451,67,- bertambah/(berkurang) Rp. 11.974.693.061,82,- sehingga menjadi Rp. 91.012.660.513,49,-
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 4.828.517.400,- bertambah/(berkurang) Rp. 1.252.685.228,94,- sehingga menjadi Rp. 6.081.202.628,94,-
- (5) Belanja Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 43.123.488.805,- bertambah/(berkurang) Rp. (974.657.049,28,-) sehingga menjadi Rp. 42.148.831.755,72,-
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2), diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS<br>KABUPATEN  | ASB   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) semula sebesar Rp 7.735.529.976,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.039.553.510,-) sehingga menjadi Rp. 6.695.976.466,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 5.740.000.000,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.039.553.510,-) sehingga menjadi Rp.4.700.446.490,-
5. Ketentuan Pasal 19, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp. 147.069.433.065,- bertambah/(berkurang) Rp. (5.589.753.122,-) sehingga menjadi Rp. 141.479.679.943,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- bertambah/(berkurang) Rp. (843.691.133,-) sehingga menjadi Rp. 1.156.308.867,-
- (3) Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 45.892.455.073,- bertambah/(berkurang) Rp. (3.922.677.051,-) sehingga menjadi Rp. 41.969.778.022,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 47.997.820.390,- bertambah/(berkurang) Rp. (678.544.576,-) sehingga menjadi Rp. 48.676.364.966,-

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINAS<br>KANTOR   | ISS   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

- (5).Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 49.841.816.002,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.520.229.514,-) sehingga menjadi Rp. 48.321.586.488,-
- (6).Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 1.337.341.600,- bertambah/(berkurang) Rp. 18.300.000,- sehingga menjadi Rp. 1.355.641.600,-
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula sebesar Rp. 137.544.168.604,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.395.739.700,-) sehingga menjadi Rp. 136.148.428.904,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 136.241.882.300,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.395.739.700,-) sehingga menjadi Rp. 134.846.142.600,- yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
7. Ketentuan Pasal 28, diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28A**

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal I akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINAS/BAKAM<br>KANTOR   | ABS   | SEKPA   | WAL   |
|  |  |  |  |  |



## **Pasal II**

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta

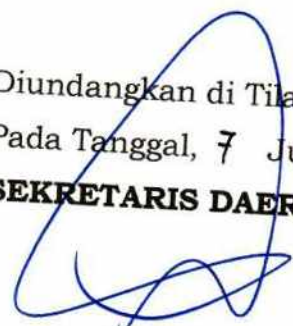
Pada tanggal, 7 Juli 2021

 **WAKIL BUPATI BOALEMO,** 

  
**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 7 Juli 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SHERMAN MORIDU**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 36).



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I  
PENJABARAN PERGESERAN  
Nomor : 36  
Tanggal : 7 July 2021

| NOMOR<br>URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) |        | % | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------|---|-------------|
|               |   | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3                       | 6      |   |             |
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                       | 6      | 7 |             |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                                 | 835.754.869.746,00 | 822.550.982.605,00 | (13.203.887.141,00)             | (1,58) |   |             |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 59.517.167.965,00  | 59.517.167.965,00  | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                      | 9.911.863.038,00   | 9.911.863.038,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.06     | Pajak Hotel                                       | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.06.01  | Pajak Hotel                                       | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.07     | Pajak Restoran                                    | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.07.02  | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.07.07  | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya           | 1.100.000.000,00   | 1.100.000.000,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.08     | Pajak Hiburan                                     | 11.000.000,00      | 11.000.000,00      | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.08.06  | Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap                        | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.08.10  | Pajak Pertandingan Olahraga                       | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.09     | Pajak Reklame                                     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.09.01  | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.09.02  | Pajak Reklame Kain                                | 40.000.000,00      | 40.000.000,00      | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.09.03  | Pajak Reklame Melekat/Stiker                      | 9.000.000,00       | 9.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.09.05  | Pajak Reklame Berjalan                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.10     | Pajak Penerangan Jalan                            | 2.700.000.000,00   | 2.700.000.000,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.10.02  | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                | 2.700.000.000,00   | 2.700.000.000,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.13     | Pajak Sarang Burung Walet                         | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.13.01  | Pajak Sarang Burung Walet                         | 5.000.000,00       | 5.000.000,00       | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14     | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan              | 1.290.863.038,00   | 1.290.863.038,00   | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14.23  | Pajak Pasir dan Kerikil                           | 360.000.000,00     | 360.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14.24  | Pajak Pasir Kuarsa                                | 350.000.000,00     | 350.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14.29  | Pajak Tanah Diatome                               | 280.863.038,00     | 280.863.038,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14.30  | Pajak Tanah Liat                                  | 25.000.000,00      | 25.000.000,00      | 0,00                            | 0,00   |   |             |
| 4.1.01.14.37  | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya      | 275.000.000,00     | 275.000.000,00     | 0,00                            | 0,00   |   |             |

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Sudi

|       |         |      |       |         |
|-------|---------|------|-------|---------|
| KABAG | DISKUSI | ASIS | SEKDA | COA-BUP |
| 1     | 1       | 1    | 1     | 1       |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    |           |      | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) |  | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|------|---------------------------------|--|-------------|
|               |   | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | %    |                                 |  |             |
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3 | 6    | 7                               |  |             |
| 4.1.01.15     | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)<br>PBBP2<br>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)<br>BPHTB-Pemindahan Hak<br>BPHTB-Pemberian Hak Baru | 1.155.000.000,00   | 1.155.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.01.15.01  |   | 1.155.000.000,00   | 1.155.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.01.16     |   | 3.150.000.000,00   | 3.150.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.01.16.01  |   | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.01.16.02  |   | 3.000.000.000,00   | 3.000.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah  | 3.111.000.000,00   | 3.111.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01     | Retribusi Jasa Umum   | 2.075.000.000,00   | 2.075.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.01  | Retribusi Pelayanan Kesehatan   | 935.000.000,00     | 935.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.04  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum   | 225.000.000,00     | 225.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.05  | Retribusi Pelayanan Pasar   | 620.000.000,00     | 620.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.06  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  | 150.000.000,00     | 150.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.09  | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  | 25.000.000,00      | 25.000.000,00      | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.11  | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Uang  | 20.000.000,00      | 20.000.000,00      | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.01.13  | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi   | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02     | Retribusi Jasa Usaha  | 936.000.000,00     | 936.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02.01  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah   | 206.000.000,00     | 206.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02.02  | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan   | 60.000.000,00      | 60.000.000,00      | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02.03  | Retribusi Tempat Pelelangan   | 270.000.000,00     | 270.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02.04  | Retribusi Terminal  | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.02.09  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  | 350.000.000,00     | 350.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.03     | Retribusi Perizinan Tertentu  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.02.03.01  | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   | 8.166.636.962,00   | 8.166.636.962,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.03.01     | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN   | 8.166.636.962,00   | 8.166.636.962,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.03.01.01  | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN   | 8.166.636.962,00   | 8.166.636.962,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah  | 38.327.667.965,00  | 38.327.667.965,00  | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.04.05     | Jasa Giro   | 1.550.000.000,00   | 1.550.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.04.05.01  | Jasa Giro pada Kas Daerah   | 1.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.04.05.02  | Jasa Giro pada Kas di Bendahara   | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |
| 4.1.04.07     | Pendapatan Bunga  | 1.361.000.000,00   | 1.361.000.000,00   | 0,00      | 0,00 |                                 |  |             |



| NOMOR<br>URUT | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) |         | % | DASAR HUKUM |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---|-------------|
|               |  | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3                       | 6       |   |             |
| 1             | 2  | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                       | 6       | 7 |             |
| 4.3.03.01.01  | Pendapatan Hibah Dana BOS  | 18.848.993.781,00  | 18.848.993.781,00  | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5             | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                    |                    |                                 |         |   |             |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                    |                    |                                 |         |   |             |
| 5.1.01        | <b>Belanja Pegawai</b>   |                    |                    |                                 |         |   |             |
| 5.1.01.01     | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 222.523.194.386,00 | 210.103.794.268,00 | (12.419.400.118,00)             | (5,58)  |   |             |
| 5.1.01.01.01  | Belanja Gaji Pokok ASN   | 161.468.763.741,00 | 150.233.355.577,00 | (11.235.408.164,00)             | (6,96)  |   |             |
| 5.1.01.01.02  | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                     | 15.772.626.341,00  | 15.292.664.563,00  | (479.961.778,00)                | (3,04)  |   |             |
| 5.1.01.01.03  | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                      | 5.996.540.610,00   | 6.005.390.630,00   | 8.850.020,00                    | 0,15    |   |             |
| 5.1.01.01.04  | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                   | 10.386.037.802,00  | 9.757.755.455,00   | (628.282.347,00)                | (6,05)  |   |             |
| 5.1.01.01.05  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                              | 2.781.176.900,00   | 2.768.279.050,00   | (12.897.850,00)                 | (0,46)  |   |             |
| 5.1.01.01.06  | Belanja Tunjangan Beras ASN  | 10.584.165.264,00  | 10.319.986.361,00  | (264.178.903,00)                | (2,50)  |   |             |
| 5.1.01.01.07  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 123.891.304,00     | 326.315.669,00     | 202.424.365,00                  | 163,39  |   |             |
| 5.1.01.01.08  | Belanja Pembulatan Gaji ASN  | 12.377.419,00      | 2.431.958,00       | (9.945.461,00)                  | (80,35) |   |             |
| 5.1.01.01.09  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 15.397.615.005,00  | 15.397.615.005,00  | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.02     | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 35.434.810.331,00  | 35.434.810.331,00  | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.02.01  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 6.609.748.333,00   | 6.289.748.333,00   | (320.000.000,00)                | (4,84)  |   |             |
| 5.1.01.02.04  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN            | 2.821.215.879,00   | 2.581.215.879,00   | (240.000.000,00)                | (8,51)  |   |             |
| 5.1.01.02.05  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                | 26.003.846.119,00  | 26.563.846.119,00  | 560.000.000,00                  | 2,15    |   |             |
| 5.1.01.03     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 40.201.697.206,00  | 39.942.147.206,00  | (259.550.000,00)                | (0,65)  |   |             |
| 5.1.01.03.01  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah             | 386.915.206,00     | 386.915.206,00     | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.03.02  | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah         | 108.885.000,00     | 108.885.000,00     | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.03.03  | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD                          | 36.097.682.000,00  | 36.097.682.000,00  | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.03.04  | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD                           | 2.887.535.000,00   | 2.887.535.000,00   | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.03.05  | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD                    | 402.000.000,00     | 402.000.000,00     | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.03.07  | Belanja Honorarium   | 318.680.000,00     | 59.130.000,00      | (259.550.000,00)                | (81,45) |   |             |
| 5.1.01.04     | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 11.187.950.880,00  | 11.187.950.880,00  | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.01  | Belanja Uang Representasi DPRD                                     | 561.540.000,00     | 561.540.000,00     | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.02  | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD                                    | 39.543.000,00      | 39.543.000,00      | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.03  | Belanja Tunjangan Beras DPRD                                       | 58.805.040,00      | 58.805.040,00      | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.04  | Belanja Uang Paket DPRD  | 56.154.000,00      | 56.154.000,00      | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.05  | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD                                     | 814.233.000,00     | 814.233.000,00     | 0,00                            | 0,00    |   |             |
| 5.1.01.04.07  | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD                    | 93.146.550,00      | 93.146.550,00      | 0,00                            | 0,00    |   |             |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) | % | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------|
|               |   | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN |                    |                                 |   |             |
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3          | 6                               | 7 |             |
| 5.1.01.04.08  | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD               | 2.205.000.000,00   | 2.205.000.000,00   | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.04.09  | Belanja Tunjangan Reses DPRD  | 472.500.000,00     | 472.500.000,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.04.10  | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD                       | 243.449.290,00     | 243.449.290,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.04.12  | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD                     | 3.378.060.000,00   | 3.378.060.000,00   | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.04.13  | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD   | 3.245.520.000,00   | 3.245.520.000,00   | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.04.14  | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD   | 20.000.000,00      | 20.000.000,00      | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.05     | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH   | 556.592.416,00     | 376.403.884,00     | (180.188.532,00)   | (32,37)                         |   |             |
| 5.1.01.05.01  | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH   | 121.851.600,00     | 60.925.800,00      | (60.925.800,00)    | (50,00)                         |   |             |
| 5.1.01.05.02  | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH   | 7.873.488,00       | 3.936.744,00       | (3.936.744,00)     | (50,00)                         |   |             |
| 5.1.01.05.03  | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH  | 219.332.880,00     | 109.666.440,00     | (109.666.440,00)   | (50,00)                         |   |             |
| 5.1.01.05.04  | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH  | 11.313.452,00      | 5.656.726,00       | (5.656.726,00)     | (50,00)                         |   |             |
| 5.1.01.05.05  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH                               | 872.426,00         | 872.426,00         | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.05.06  | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH  | 5.624,00           | 2.802,00           | (2.822,00)         | (50,18)                         |   |             |
| 5.1.01.05.10  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah                   | 148.677.946,00     | 148.677.946,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.05.11  | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 46.665.000,00      | 46.665.000,00      | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.06     | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                       | 512.879.363,00     | 502.388.096,90     | (10.491.266,10)    | (2,05)                          |   |             |
| 5.1.01.06.01  | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  | 110.880.000,00     | 110.880.000,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.06.02  | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH   | 401.999.363,00     | 391.508.096,90     | (10.491.266,10)    | (2,61)                          |   |             |
| 5.1.01.88     | Belanja Pegawai BOS   | 4.078.013.000,00   | 4.078.013.000,00   | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.88.88  | Belanja Pegawai BOS   | 4.078.013.000,00   | 4.078.013.000,00   | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.99     | Belanja Pegawai BLUD  | 13.005.406.845,00  | 13.005.406.845,00  | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.01.99.99  | Belanja Pegawai BLUD  | 13.005.406.845,00  | 13.005.406.845,00  | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa   | 223.035.993.674,00 | 237.932.190.565,10 | 14.896.196.891,10  | 6,68                            |   |             |
| 5.1.02.01     | Belanja Barang  | 67.849.154.069,33  | 71.516.331.718,95  | 3.667.177.649,62   | 5,40                            |   |             |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  | 67.849.154.069,33  | 71.516.331.718,95  | 3.667.177.649,62   | 5,40                            |   |             |
| 5.1.02.02     | Belanja Jasa  | 79.037.967.451,67  | 91.012.660.513,49  | 11.974.693.061,82  | 15,15                           |   |             |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   | 66.134.817.422,67  | 82.972.165.447,49  | 16.837.348.024,82  | 25,46                           |   |             |
| 5.1.02.02.02  | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  | 4.061.811.804,00   | 2.995.323.513,00   | (1.066.488.291,00) | (26,26)                         |   |             |
| 5.1.02.02.03  | Belanja Sewa Tanah  | 131.000.000,00     | 126.000.000,00     | (5.000.000,00)     | (3,82)                          |   |             |
| 5.1.02.02.04  | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  | 1.644.175.000,00   | 1.308.075.500,00   | (336.099.500,00)   | (20,44)                         |   |             |
| 5.1.02.02.05  | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  | 1.050.432.250,00   | 1.193.875.518,00   | 143.443.268,00     | 13,66                           |   |             |

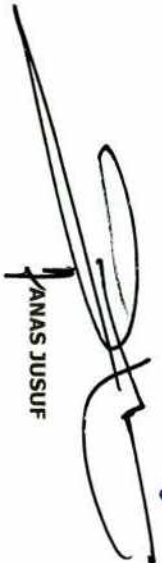


| NOMOR URUT   | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |                    |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) | % | DASAR HUKUM |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|-------------|
|              |  | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3          |                                 |   |             |
| 1            | 2  | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3          | 6                               | 7 |             |
| 5.1.05.07    | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik           | 745.529.976,00     | 745.529.976,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik           | 745.529.976,00     | 745.529.976,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.06       | <b>Belanja Bantuan Sosial</b>                                  | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.06.01    | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu                         | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Ulang yang direncanakan kepada Individu | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.2          | <b>BELANJA MODAL</b>   | 147.069.433.065,00 | 141.479.679.943,00 | (5.589.753.122,00) | (3,80)                          |   |             |
| 5.2.01       | <b>Belanja Modal Tanah</b>                                     | 2.000.000.000,00   | 1.156.308.867,00   | (843.691.133,00)   | (42,18)                         |   |             |
| 5.2.01.01    | Belanja Modal Tanah  | 2.000.000.000,00   | 1.156.308.867,00   | (843.691.133,00)   | (42,18)                         |   |             |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil                                     | 2.000.000.000,00   | 1.156.308.867,00   | (843.691.133,00)   | (42,18)                         |   |             |
| 5.2.02       | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>                       | 45.892.455.073,00  | 41.969.778.022,00  | (3.922.677.051,00) | (8,55)                          |   |             |
| 5.2.02.01    | Belanja Modal Alat Besar                                       | 50.933.400,00      | 50.933.400,00      | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu                                       | 50.933.400,00      | 50.933.400,00      | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.2.02.02    | Belanja Modal Alat Angkutan                                    | 4.038.539.000,00   | 2.328.500.000,00   | (1.710.039.000,00) | (42,34)                         |   |             |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                     | 3.288.539.000,00   | 2.328.500.000,00   | (960.039.000,00)   | (29,19)                         |   |             |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                 | 750.000.000,00     | 0,00               | (750.000.000,00)   | (100,00)                        |   |             |
| 5.2.02.03    | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur                       | 173.486.164,00     | 9.456.500,00       | (164.029.664,00)   | (94,55)                         |   |             |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin                            | 2.904.000,00       | 2.904.000,00       | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin                        | 6.552.500,00       | 6.552.500,00       | 0,00               | 0,00                            |   |             |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur  | 164.029.664,00     | 0,00               | (164.029.664,00)   | (100,00)                        |   |             |
| 5.2.02.05    | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                     | 2.841.675.718,00   | 2.387.634.416,00   | (454.041.302,00)   | (15,98)                         |   |             |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor                                      | 531.834.874,00     | 357.212.374,00     | (174.622.500,00)   | (32,83)                         |   |             |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                | 1.834.490.044,00   | 1.484.697.042,00   | (349.793.002,00)   | (19,07)                         |   |             |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat               | 475.350.800,00     | 545.725.000,00     | 70.374.200,00      | 14,80                           |   |             |
| 5.2.02.06    | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar             | 156.103.120,00     | 119.975.000,00     | (36.128.120,00)    | (23,14)                         |   |             |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio                                      | 154.021.000,00     | 119.975.000,00     | (34.046.000,00)    | (22,10)                         |   |             |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi                                  | 2.082.120,00       | 0,00               | (2.082.120,00)     | (100,00)                        |   |             |
| 5.2.02.07    | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan                    | 24.884.015.778,00  | 23.640.731.183,00  | (1.243.284.595,00) | (5,00)                          |   |             |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran                                  | 21.247.552.276,00  | 19.855.452.425,00  | (1.392.099.851,00) | (6,55)                          |   |             |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum                              | 3.636.463.502,00   | 3.785.278.758,00   | 148.815.256,00     | 4,09                            |   |             |
| 5.2.02.08    | Belanja Modal Alat Laboratorium                                | 167.745.245,00     | 318.481.175,00     | 150.735.930,00     | 89,86                           |   |             |

| NOMOR<br>URUT | URAIAN  | JUMLAH (Rp)        |                    |                    |         | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) | % | DASAR HUKUM |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------|---|-------------|
|               |   | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3          | 6       |                                 |   |             |
| 1             | 2   | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3          | 6       | 7                               |   |             |
| 5.2.02.08.01  | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium<br>Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah<br>Belanja Modal Komputer<br>Belanja Modal Komputer Unit<br>Belanja Modal Peralatan Komputer<br>Belanja Modal Alat Peraga<br>Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan<br>Belanja Modal Peralatan Olahraga<br>Belanja Modal Peralatan Olahraga  | 117.745.245,00     | 160.561.175,00     | 42.815.930,00      | 36,36   |                                 |   |             |
| 5.2.02.08.03  |   | 50.000.000,00      | 157.920.000,00     | 107.920.000,00     | 215,84  |                                 |   |             |
| 5.2.02.10     |   | 11.389.956.648,00  | 10.993.004.348,00  | (396.952.300,00)   | (3,49)  |                                 |   |             |
| 5.2.02.10.01  |   | 8.086.834.848,00   | 7.860.937.048,00   | (225.897.800,00)   | (2,79)  |                                 |   |             |
| 5.2.02.10.02  | Belanja Modal Peralatan Komputer<br>Belanja Modal Alat Peraga<br>Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan<br>Belanja Modal Peralatan Olahraga<br>Belanja Modal Peralatan Olahraga  | 3.303.121.800,00   | 3.132.067.300,00   | (171.054.500,00)   | (5,18)  |                                 |   |             |
| 5.2.02.16     |   | 1.965.000.000,00   | 1.965.000.000,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.02.16.01  |   | 1.965.000.000,00   | 1.965.000.000,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.02.19     |   | 225.000.000,00     | 156.062.000,00     | (68.938.000,00)    | (30,64) |                                 |   |             |
| 5.2.02.19.01  | Belanja Modal Peralatan Olahraga<br>Belanja Modal Gedung dan Bangunan<br>Belanja Modal Bangunan Gedung<br>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja<br>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal  | 225.000.000,00     | 156.062.000,00     | (68.938.000,00)    | (30,64) |                                 |   |             |
| 5.2.03        |   | 47.997.820.390,00  | 48.676.364.966,00  | 678.544.576,00     | 1,41    |                                 |   |             |
| 5.2.03.01     |   | 47.997.820.390,00  | 48.676.364.966,00  | 678.544.576,00     | 1,41    |                                 |   |             |
| 5.2.03.01.01  |   | 46.145.186.642,00  | 46.823.731.218,00  | 678.544.576,00     | 1,47    |                                 |   |             |
| 5.2.03.01.02  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal<br>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi<br>Belanja Modal Jalan dan Jembatan<br>Belanja Modal Jembatan<br>Belanja Modal Bangunan Air<br>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi<br>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam<br>Belanja Modal Instalasi<br>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku<br>Belanja Modal Instalasi Air Kotor<br>Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah<br>Belanja Modal Instalasi Lain | 1.852.633.748,00   | 1.852.633.748,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.04        |   | 49.841.816.002,00  | 48.321.586.488,00  | (1.520.229.514,00) | (3,05)  |                                 |   |             |
| 5.2.04.01     |   | 35.089.305.100,00  | 35.124.572.086,00  | 35.266.986,00      | 0,10    |                                 |   |             |
| 5.2.04.01.01  |   | 12.997.505.100,00  | 13.009.921.600,00  | 12.416.500,00      | 0,10    |                                 |   |             |
| 5.2.04.01.02  | Belanja Modal Jembatan<br>Belanja Modal Bangunan Air<br>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi<br>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam<br>Belanja Modal Instalasi<br>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku<br>Belanja Modal Instalasi Air Kotor<br>Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah<br>Belanja Modal Instalasi Lain   | 22.091.800.000,00  | 22.114.650.486,00  | 22.850.486,00      | 0,10    |                                 |   |             |
| 5.2.04.02     |   | 11.402.777.752,00  | 9.832.281.252,00   | (1.570.496.500,00) | (13,77) |                                 |   |             |
| 5.2.04.02.01  |   | 7.436.548.752,00   | 7.314.545.252,00   | (122.003.500,00)   | (1,64)  |                                 |   |             |
| 5.2.04.02.04  |   | 3.966.229.000,00   | 2.517.736.000,00   | (1.448.493.000,00) | (36,52) |                                 |   |             |
| 5.2.04.03     | Belanja Modal Bangunan Air<br>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi<br>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam<br>Belanja Modal Instalasi<br>Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku<br>Belanja Modal Instalasi Air Kotor<br>Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah<br>Belanja Modal Instalasi Lain   | 3.349.733.150,00   | 3.364.733.150,00   | 15.000.000,00      | 0,45    |                                 |   |             |
| 5.2.04.03.01  |   | 1.082.608.150,00   | 1.082.608.150,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.04.03.02  |   | 929.625.000,00     | 929.625.000,00     | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.04.03.03  |   | 1.337.500.000,00   | 1.337.500.000,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.04.03.10  | Belanja Modal Instalasi Lain<br>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya<br>Belanja Modal Bahan Perpustakaan<br>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak<br>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud<br>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud   | 0,00               | 15.000.000,00      | 15.000.000,00      | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.05        |   | 1.337.341.600,00   | 1.355.641.600,00   | 18.300.000,00      | 1,37    |                                 |   |             |
| 5.2.05.01     |   | 1.292.341.600,00   | 1.292.341.600,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.05.01.01  |   | 1.292.341.600,00   | 1.292.341.600,00   | 0,00               | 0,00    |                                 |   |             |
| 5.2.05.08     | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud<br>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  | 45.000.000,00      | 63.300.000,00      | 18.300.000,00      | 40,67   |                                 |   |             |
| 5.2.05.08.01  |   | 45.000.000,00      | 63.300.000,00      | 18.300.000,00      | 40,67   |                                 |   |             |

| NOMOR URUT          | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |                     |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG) | DASAR HUKUM |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                     |  | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN  | (Rp)               | %                       |             |
| 1                   | 2  | 3                  | 4                   | 5 = 4 - 3          | 6                       | 7           |
| 5.3                 | BELANJA TIDAK TERDUGA  |                    |                     |                    |                         |             |
| 5.3.01              | Belanja Tidak Terduga  | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00    | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.3.01.01           | Belanja Tidak Terduga  | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00    | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.3.01.01.01        | Belanja Tidak Terduga  | 1.000.000.000,00   | 1.000.000.000,00    | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.4                 | BELANJA TRANSFER   |                    |                     |                    |                         |             |
| 5.4.01              | Belanja Bagi Hasil   | 137.544.168.604,00 | 136.148.428.904,00  | (1.395.739.700,00) | (1,01)                  |             |
| 5.4.01.01           | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa                    | 1.302.286.304,00   | 1.302.286.304,00    | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.4.01.01.03        | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                                       | 991.186.304,00     | 991.186.304,00      | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.4.01.02           | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                      | 991.186.304,00     | 991.186.304,00      | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.4.01.02.01        | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa                      | 311.100.000,00     | 311.100.000,00      | 0,00               | 0,00                    |             |
| 5.4.02              | Belanja Bantuan Keuangan   | 136.241.882.300,00 | 134.846.142.600,00  | (1.395.739.700,00) | (1,02)                  |             |
| 5.4.02.05           | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                       | 136.241.882.300,00 | 134.846.142.600,00  | (1.395.739.700,00) | (1,02)                  |             |
| 5.4.02.05.01        | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                  | 44.398.702.300,00  | 43.002.962.600,00   | (1.395.739.700,00) | (3,14)                  |             |
| 5.4.02.05.02        | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                | 91.843.180.000,00  | 91.843.180.000,00   | 0,00               | 0,00                    |             |
| SURPLUS / (DEFISIT) |  | (8.230.800.000,00) | (15.436.207.784,00) | (7.205.407.784,00) | 87,54                   |             |
| 6                   | PEMBIAYAAN DAERAH  |                    |                     |                    |                         |             |
| 6.1                 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN  |                    |                     |                    |                         |             |
| 6.1.01              | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 10.230.800.000,00  | 19.436.207.784,00   | 9.205.407.784,00   | 89,98                   |             |
| 6.1.01.07           | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 10.230.800.000,00  | 19.436.207.784,00   | 9.205.407.784,00   | 89,98                   |             |
| 6.1.01.07.01        | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      | 10.230.800.000,00  | 19.436.207.784,00   | 9.205.407.784,00   | 89,98                   |             |
| 6.2                 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN   |                    |                     |                    |                         |             |
| 6.2.02              | Penyertaan Modal Daerah  | 2.000.000.000,00   | 4.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00   | 100,00                  |             |
|                     |  | 2.000.000.000,00   | 4.000.000.000,00    | 2.000.000.000,00   | 100,00                  |             |

| NOMOR<br>URUT        | URAIAN   | JUMLAH (Rp)        |                    | BERTAMBAH / (BERKURANG)<br>(Rp) |        | % | DASAR HUKUM |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------|---|-------------|
|                      |  | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3                       |        |   |             |
| 1                    | 2  | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3                       | 6      | 7 |             |
| 6 . 2 . 02 . 02      | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.000.000.000,00   | 4.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00                | 100,00 |   |             |
| 6 . 2 . 02 . 02 . 01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                            | 2.000.000.000,00   | 4.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00                | 100,00 |   |             |
|                      | PEMBIAYAAN NETTO   | 8.230.800.000,00   | 15.436.207.784,00  | 7.205.407.784,00                | 87,54  |   |             |
|                      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN               | 0,00               | 0,00               | 0,00                            | 0,00   |   |             |

Tilamuta, 7 July 2021  
  
WAKIL BUPATI BOALEMO  
YANAS JUSUF